

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas Menurut Waluyo (2013), meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam sebuah pemerintahan baik pemerintah terbesar maupun terkecil yaitu pemerintah Desa. Karena pemerintahan dapat dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari unit yang terkecil yaitu Desa. Akuntabilitas pemerintah desa merupakan tolok ukur kemampuan pemerintah untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait keuangan yang telah disusun dalam APBDes dimana salah satu komponen dalam APBDes yaitu Dana Desa. Oleh karena itu, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah diterima oleh kabupaten/kota dalam pembagiannya untuk tiap desa harus dibagikan secara proporsional.

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tujuan pengaturan desa sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Pengembangan Desa merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dimana sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada bab 5 pasal 20 sampai 43 yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek pemerintahan yang baik dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang tinggi. Karena dalam proses pengelolaan keuangan desa harus didasari dengan prinsip akuntabilitas, karena apabila tidak didasari dengan prinsip akuntabilitas akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa, seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode berikutnya. Dana desa yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, serta pengelolaan dana desa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan, seperti Hasil penelitian Astuti dan Fanida (2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Sumiati (2015) mengatakan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan DD

pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal tersebut terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas DD oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Pengorganisasian belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing karena faktor kompetensi SDM yang kurang memadai. Dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa secara periodik terhadap pengelolaan DD belum maksimal. Faradhiba dan Diana (2018) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes di desa tersebut. Terkaiat dengan transparansi dan akuntabilitas perangkat desa di Desa Banjarsari, maka perencanaan dan pelaksanaan APBDes sudah berjalan dengan maksimal. Namun masih terdapat kendala terkaiat dengan pencairan sumberdana yang tidak sesuai dengan rencana. Kesimpulan yang di dapatkan yaitu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan APBDes.

Karena akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Dana desa yang cukup besar menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi dari penelitian terdahulu diatas, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa kurang baik dari berbagai daerah di atas. Untuk lebih lanjut peneliti melakukan penelitian Pengelolaan Dana Desa di Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk meneliti dalam pengelolaan

Dana Desa di Desa ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas serta kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Peneliti memilih desa ini untuk dijadikan obyek penelitian karena di Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang kurang terbuka dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang memiliki pandangan buruk terhadap perangkat desa, contoh adanya penyelewengan penggunaan DD oleh perangkat desa. Pandangan dari masyarakat tersebut diperkuat dengan beberapa masalah seperti tidak adanya pembangunan yang memberi manfaat untuk masyarakat. Salah satu contoh jalan utama di Desa tersebut semakin tahun bukannya menjadi lebih baik namun menjadi semakin parah karena belum adanya perbaikan jalan. Selain itu, perangkat desa tidak memberikan informasi mengenai berapa DD yang diterima dan akan digunakan untuk kegiatan atau program apa di tahun 2018.

Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas, karena akuntabilitas dapat digunakan untuk membuktikan dan menjelaskan strategik dan tujuan yang telah direncanakan serta ditetapkan oleh organisasi pemerintahan sehingga dapat terlaksana/berjalan dengan efektif dan efisien. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ?

C. Tujuan

Untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.

D. Manfaat

1. Manfaat Teori

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah wawasan, acuan maupun sebagai pedoman ataupun sebagai referensi bagi pembaca dan literatur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) khususnya Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang agar kedepannya dalam pengelolaan DD lebih baik lagi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pengelolaan DD dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dan semoga hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih mendalam dengan tema yang sama.